



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ADI PRASETYA
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 400257

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.690.808.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/68 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 612.969.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/68 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 555.939.000
4. Tanah Seluas 4984 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 900.900.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/29 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 171.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **136.680.000**

1. MOBIL, DATSUN GO PLUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 79.800.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.160.000
4. MOTOR, KYMCO 110CC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 120.000



5. MOTOR, HONDA 125CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.600.000
6. MOTOR, SELIS BEBEK Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. LAINNYA, SELIS SEPEDA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>529.860.900</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>324.048.536</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	<b>63.690.000</b>
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>3.745.087.436</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>1.377.742.500</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>2.367.344.936</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.